

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PR.02.01/7.2/PKTN.6.3/Perkin/12/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aribianto
Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Khakim Kundiarto
Jabatan : Plt. Direktur Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua
Plt. Direktur Tertib Niaga



Khakim Kundiarto

Pihak Pertama
Kepala BPTN Surabaya



Aribianto

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA**

Kegiatan: Peningkatan Tertib Niaga

No	Sasaran Kegiatan Eselon II	Sasaran Kegiatan Eselon III	Indikator Rincian Output	Target	Satuan	Prediksi Capaian (Kumulatif)			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan BPTN Surabaya	Jumlah Pengawasan <i>Post Border</i>	306	Produk/ Berita Acara	16	44	77	100
			Pengawasan Kegiatan Perdagangan	25	Lembaga	20	60	80	100
			Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	50	Orang	-	-	100	100

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Prediksi Capaian (Kumulatif)			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTN Surabaya	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPTN Surabaya	90	Satuan	-	-	-	100

Anggaran:

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Satuan RO	Anggaran (Rp)
(1)	(2)			(3)
3992	Peningkatan Tertib Niaga			1.073.120.000
3992.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			
3992.AEF.023	Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	50	orang	50.000.000
3992.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk			
3992.QIA.024	Pengawasan Post Border	306	produk	873.120.000
3992.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
3992.QIC.025	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	25	lembaga	150.000.000
3977	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN			986.880.000
3997.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
3977.CAN.021	Pengadaan Perangkat TIK	4	Unit	50.000.000
3977.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
3977.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	120.000.000
3977.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	816.880.000
Total				<u>2.060.000.000</u>

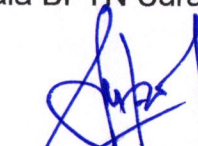
Surabaya, Desember 2022

Plt. Direktur Tertib Niaga



Khakim Kundiarto

Kepala BPTN Surabaya



Aribianto

FORMULIR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

1.	Kegiatan	:	Peningkatan Tertib Niaga
2.	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya
3.	Indikator Kinerja	:	Jumlah <i>Pengawasan Post Border</i>
4.	Definisi Operasional	:	1) Pengawasan Post Border dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, dimana importir wajib memenuhi persyaratan impor terhadap barang tersebut, yaitu kewajiban mencantumkan dengan benar nomor dan tanggal dokumen Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor di dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Selain itu pemeriksaan dilakukan pula terhadap jumlah atau volume impor barang. 2) Balai Pengawasan Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 3) Wilayah kerja BPTN Surabaya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. 4) Dasar hukum yang digunakan adalah - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)
5.	Target	:	Pengawasan Post Border: 306 produk/Berita Acara
6.	Cara Perhitungan	:	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Post Border yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
7.	Sumber Data	:	Berita Acara hasil pengawasan Post Border
8.	Periode Pengukuran	:	Januari – Desember 2023, dihitung per triwulan

1.	Kegiatan	:	Peningkatan Tertib Niaga
2.	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya
3.	Indikator Kinerja	:	Jumlah Pengawasan Perdagangan
4.	Definisi Operasional	:	1) Kegiatan Pengawasan Perdagangan merupakan pengawasan kegiatan perdagangan yang diselenggarakan sesuai Pasal 100 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 2) Balai Pengawasan Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 3) Wilayah kerja BPTN Surabaya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. 4) Dasar hukum yang digunakan adalah - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
5.	Target	:	Pengawasan Kegiatan Perdagangan: 25 lembaga
6.	Cara Perhitungan	:	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Perdagangan sesuai ketentuan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan
7.	Sumber Data	:	1) Berita Acara Hasil Pengawasan 2) Laporan Hasil Pengawasan
8.	Periode Pengukuran	:	Januari – Desember 2023, dihitung per triwulan

1.	Kegiatan	:	Peningkatan Tertib Niaga
2.	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya
3.	Indikator Kinerja	:	Jumlah Pelaku Usaha yang diedukasi
4.	Definisi Operasional	:	1) Balai Pengawasan Tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 2) Tugas dan Fungsi BPTN salah satunya adalah melakukan kerja sama dan kehumasan terhadap <i>stakeholder</i> terkait mengenai peraturan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan. 3) Wilayah kerja BPTN Surabaya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. 4) Dasar hukum yang digunakan adalah - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
5.	Target	:	Pelaku Usaha yang diedukasi : 50 Pelaku Usaha
6.	Cara Perhitungan	:	Jumlah Pelaku Usaha yang hadir baik secara daring maupun luring pada kegiatan Diseminasi dan Publikasi Tertib Niaga BPTN Surabaya
7.	Sumber Data	:	Laporan Kegiatan edukasi pelaku usaha kegiatan perdagangan
8.	Periode Pengukuran	:	Januari – Desember 2023

1.	Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPTN Surabaya
2.	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPTN Surabaya
3.	Indikator Kinerja	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPTN Surabaya
4.	Definisi Operasional	:	1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnyadisingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran. 2) Pengukuran IKPA dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/ PMK.05/ 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/ PMK.02/ 2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 3) Pengukuran IKPA meliputi aspek: a. Kualitas perencanaan anggaran; b. Kualitas pelaksanaan anggaran; dan c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
5.	Target	:	90
6.	Cara Perhitungan	:	Nilai IKPA diperoleh dari penjumlahan) nilai indikator pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja dibagi dengan konversi bobot. Adapun bobot maupun indikator dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan peraturan terkait Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.
7.	Sumber Data	:	Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OMSPAN) Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
8.	Periode Pengukuran	:	Penilaian IKPA dilakukan setiap triwulan. Nilai IKPA pada target adalah IKPA pada akhir tahun (Bulan Desember)

Jakarta, Desember 2022

Kepala BPTN Surabaya



Aribianto

MATRIKS RENCANA AKSI 2023
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

KEGIATAN: PENINGKATAN TERTIB NIAGA

Level Kinerja	Kode	Uraian	Target	Satuan	Pagu	Rencana Aksi Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran	01	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan BPTN Surabaya							
Indikator Kinerja	1.1	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan di wilayah kerja BPTN Surabaya	306	Produk					
			25	Lembaga					
Rincian Output	3992.AEF.023	Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	50	Orang	50,000,000				
Komponen	051	Menyelenggarakan Edukasi Pelaku Usaha Terkait Kegiatan Perdagangan	50	Orang	50,000,000				
Aktivitas	A	Menyelenggarakan Diseminasi dan Publikasi Tertib Niaga BPTN Surabaya	1	Laporan	50,000,000	Kegiatan belum mulai	Perencanaan	Pelaksanaan	Selesai
Rincian Output	3992.QIA.024	Pengawasan Post Border	306	Produk	873,120,000				
Komponen	051	Melaksanakan Persiapan Pengawasan Post Border	1	Laporan					

Aktivitas	A	Melaksanakan Persiapan Pengawasan Post Border	1	Laporan	13,120,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Selesai	Selesai
Komponen	052	Melakukan Pengawasan Post Border	306	Berita Acara	860,000,000				
Aktivitas	B	Melakukan Pengawasan Post Border	12	Laporan	750,000,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Aktivitas	C	Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Partisipasi Kegiatan Pengawasan Post Border BPTN Surabaya	1	Laporan	50,000,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Aktivitas	D	Operasional Analyzing Point Post Border BPTN Surabaya	1	Laporan	60,000,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Rincian Output	3992.QIC.025	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	25	Lembaga	150,000,000				
Komponen	053	Melaksanakan Pengawasan Khusus Kegiatan Perdagangan	25	Lembaga	150,000,000				
Aktivitas	A	Melaksanakan Pengawasan Khusus BPTN Surabaya	25	Lembaga	150,000,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai

KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PKTN

Sasaran	01	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran BPTN Surabaya							
Indikator Kinerja	1.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPTN Surabaya	90	Satuan					
Rincian Output	3977.CAN.021	Pengadaan Perangkat TIK	4	Unit	50,000,000				
Komponen	051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	4	Unit	50,000,000				

Aktivitas	A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPTN Surabaya	4	Unit	50,000,000	Perencanaan	Pelaksanaan	Selesai	Selesai
Rincian Output	3977.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	120,000,000				
Komponen	051	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	6	Dokumen	4,760,000				
Aktivitas	A	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	6	Dokumen	4,760,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Komponen	052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen	6,220,000				
Aktivitas	B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	12	Dokumen	6,220,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Komponen	053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2	Dokumen	6,551,000				
Aktivitas	C	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2	Dokumen	6,551,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Komponen	054	Pengelolaan Kepegawaian	1	Dokumen	5,710,000				
Aktivitas	D	Pengelolaan Kepegawaian	1	Dokumen	5,710,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
Komponen	055	Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	Laporan	96,759,000				
Aktivitas	E	Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	Laporan	42,128,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai
	F	Pencegahan COVID - 19	1	Laporan	54,631,000				
Rincian Output	3977.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	816,880,000				
Komponen	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Laporan	816,880,000				
Aktivitas	A	Honorarium Satuan Kerja BPTN Surabaya	1	Dokumen	96,000,000	Perencanaan dan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Selesai

						<i>Pelaksanaan</i>			
Aktivitas	B	Operasional Perkantoran dan Pimpinan BPTN Surabaya	1	Laporan	710,050,000	<i>Perencanaan dan Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan dan Selesai</i>
Aktivitas	C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPTN Surabaya	1	Laporan	10,830,000	<i>Perencanaan dan Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Pelaksanaan dan Selesai</i>

Surabaya, Desember 2022

Plt. Direktur Tertib Niaga



Khakim Kudiarto

Kepala BPTN Surabaya



Aribianto